UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Pengaruh Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Tunggakan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Gunungkidul**
Efina Anastasya Septiana, Dina Natasari, S.E., M.Si.,Ak
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

Ajima, I. (2023). *PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN, JARAK TEMPAT TINGGAL, DAN PENDAPATAN TERHADAP TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KUPANG*. Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Ajima, I., Perseveranda, M. E., & Timuneno, A. Y. W. (2022). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN, JARAK TEMPAT TINGGAL, DAN PENDAPATAN TERHADAP TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN. *Jurnal Bisnis, Ekonomi, dan Sains*, *2*, 364–380. https://journal.widyatama.ac.id/index.php/bes

Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. Dalam *ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND HUMAN DECISION PROCESSES* (Vol. 50). University of Massachusetts at Amherst.

Anugrah, M. S. S., & Fitriandi, P. (2022). ANALISIS KEPATUHAN PAJAK BERDASARKAN THEORY OF PLANNED BEHAVIOR. *Jurnal Info Artha*, 1–12.

Arianti, N. N. (2023). *PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, TINGKAT PENDAPATAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PRIBADI*. Universitas Islam Sultan Agung.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul. (2025). *Data PBB-P2 Kabupaten Gunungkidul*.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. (2025). *Master data Baperidda DIY tahun 2021–2024*. https://bapperida.jogjaprov.go.id/dataku/data_keuangan/index/35-pajak-daerah

Badan Pusat Statistik. (2025, September 9). *Upah Minimum Regional (Rupiah), 2025*. https://yogyakarta.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjcwIzI=/upah-minimum-regional.html akses januari 2026

Barlan, A. R., Laekkeng, M., & Sari, R. (2021). PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, TINGKAT PENDAPATAN, DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, *6*(2), 2021. http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab

Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2016). *ANALISIS REGRESI DALAM PENELITIAN EKONOMI DAN BISNIS*. Rajawali Pers. https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/2051/C.2-NAno%20Prawoto.pdf?s

Dalimunthe, R. A. (2023). *PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN PEMUTIHAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA* [Universitas Gadjah Mada]. http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Pengaruh Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Tunggakan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Gunungkidul**
Efina Anastasya Septiana, Dina Natasari, S.E., M.Si.,Ak
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Handayani, D. (2020). *PENGARUH KESADARAN, KUALITAS PELAYANAN, PENDAPATAN DAN RELIGIUSITAS TERHADAP TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI DKI JAKARTA*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Heider, F. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations*. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1037/10628-000

Judge, T. A., & Robbins, S. P. (2017). *Organizational behavior*.

Lobo, F. N., Hallan, M. A. K. B., Seran, G. F. V., Danggur, E. J., & Pahawu, R. S. B. (2025). Faktor-Faktor Penghambat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Kupang. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, *4*, 1710–1716. https://doi.org/10.38035/jim.v4i3

Nugroho, M. A. (2024). *PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, TINGKAT PENGHASILAN, KUALITAS PELAYANAN, KEPERCAYAAN PUBLIK, DAN PERKEMBANGAN INFRASTRUKTUR TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA YOGYAKARTA*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Parera, A. M. W., & Erawati, T. (2017). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN. *Jurnal Akuntansi*, *5*(1), 37–48. https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.255

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. (2019). *Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul*.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. (2021). *Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah*.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. (2023). *Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah*.

Putri, O. A., & Ismunawan, I. (2021). DEPARTMEN OF INCOME, SOCIALIZATION, TAXPAYER AWARENESS, AND TAX SANCTION TOWARD COMPLIANCE LAND AND BUILDING TAX PAYMENT AT DUKUH PENGKOL. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, *6*(2), 95–113. https://doi.org/10.20473/baki.v6i2.25521

Rahayu, D., Adila, F. S., & Kefi, B. S. (2023). Pengaruh Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Auditing*, *4*, 1–14.

Republik Indonesa. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perpajakan dalam bentuk Kahar Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019*.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Pengaruh Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Tunggakan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Gunungkidul**
Efina Anastasya Septiana, Dina Natasari, S.E., M.Si.,Ak
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Republik Indonesia. (2007). *Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi* .

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah*.

Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan No.49/PMK.07/2016*.

Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pengampunan Pajak*.

Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

Saputra, K. A., & Yasa, I. N. P. (2022). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KABUPATEN BULELENG. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, *13*, 36–46.

Savitri, E., & Musfialdy, M. (2016). The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Penalties, Compliance Cost at Taxpayer Compliance with Service Quality as Mediating Variable. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, *219*, 682–687. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.051

Seventeen, W. L., Arnova, I., & Fitriano, Y. (2023). Pengaruh Faktor Demografis (Usia, Jenis Kelamin, dan Penghasilan) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Bengkulu. *Jurnal Ekombis Review*, *11*, 1221–1226. https://doi.org/https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i12

Sugiyono, S. (2023). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D* (S. Sutopo, Ed.; 5 ed.). CV ALFABETA.

Sulistianto, K. E. (2018). *PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi pada WPOP yang Terdaftar di Kantor Pajak Pratama Malang Selatan)*. Univesitas Brawijaya.

Wardani, D. K., & Rumiyatun, R. (2017). PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, DAN SISTEM SAMSAT DRIVE THRU TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul). *Jurnal Akuntansi*, *5*(1), 15–24. https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253

Wiesesa, R. A. (2025). *PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH, DAN INFRASTRUKTUR JALAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI JAWA BARAT* [UNIVERSITAS GADJAH MADA]. http://etd.repository.ugm.ac.id/